

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah. *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke-1. Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.

_____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed.revisi. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya 1996 .

_____. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1991.

Chainur Arrasjid. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

D.P.H Sitompul. *Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana (Hukum dan Pembangunan) No. 6 Tahun XXIII, Desember 1993*.

Evi Hartani. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Henry Arianto. “*Metode Penelitian Hukum*”, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, 2007.

Loebby Loqman. *Pra-Peradilan di Indonesia*, Cet.3. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1996.

Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan, 2006.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika 2003

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II MA-RI, Cet.ke-4. Jakarta: MA-RI, 2003.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976.

Prinst Darwin. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- R. Soeparmono. *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- R. Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Sinar Grafika 1957.
- R. Soesilo, *Penggeledahan Dalam Keadaan Mendesak*. Bandung: Citra Aditya Bakti (1985),
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Ratna Nurul Afifah. *Praperadilan dan ruang lingkungannya*. Jakarta, Akademika Pressindo CV, 1986.
- Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1976.
- Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007.
- Soewartojo Junaidi. *Korupsi Pola Kegiatan Dan Penindakan Serata Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Restu Agung, 1995.
- Sutomo Suriatmodji. *Penangkapan dan penahanan di Indonesia*. Bandung: Pradnja Paramita, 1981.
- Van Apeldoorn, LJ. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

- _____. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- _____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165, TLN No. 3886.
- _____. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.
- _____. *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137, TLN No. 4250.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- _____. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*
- _____. *Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, kolusi, dan Nepotisme*
- _____. *Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PP No. 58 Tahun 2010.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PP No. 27 Tahun 1983.
- _____. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 150

C. JURNAL

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Perpolisian Masyarakat"*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006.

D. INTERNET

Telephone Tapping. <http://en.wikipedia.org/wiki/Wiretap>, diakses pada tanggal 28 November 2013

Mengawal Peraturan Kapolri No.8/2009 tentang HAM. <http://edipetebang.blogspot.com/2009/10/mengawal-peraturan-kapolri-n082009.html>, Diunduh pada tanggal 29 Mei 2013